



Buletin Parlementaria



3 Selamatkan
Tenaga Kerja Sritex,
Jangan Sampai
Ada PHK



4 Terima Kunjungan
Bamus Majelis
Nasional Korsel



**Omnibus Law
Kesehatan,
Solusi Naikkan
Kualitas RS
Daerah**



**Dorong
Pendidikan
Gratis Secara
Menyeluruh**



Tinjau Program Makan Bergizi Gratis

Nomor 1318/III/XI/2024 November 2024



9 772614 339005



Tinjau Program Makan Bergizi Gratis



FOTO: RIA/PDT

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini melakukan peninjauan program inovatif Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 01 Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/11/2024).

Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) Komisi IX DPR RI melakukan peninjauan program inovatif Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 01 Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Program ini bertujuan memastikan seluruh siswa mendapatkan asupan gizi seimbang yang sesuai dengan standar kesehatan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mengapresiasi kesiapan pemerintah dalam melaksanakan uji coba makan bergizi gratis. "Kami melihat langsung antusiasme, gembira anak-anak yang menerima makanan bergizi ini," ujarnya saat berkunjung ke

SDN 01 Pekansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/11).

Ia berharap program yang dinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan dengan maksimal. Sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, melahirkan generasi yang cemerlang, cerdas dan unggul.

Dalam peninjauan tersebut, Yahya menjelaskan bahwa harga satu porsi makanan yang disajikan mencapai Rp15 ribu, dengan menu lengkap yang mencakup nasi, lauk, sayur, buah, dan susu. "Saya tanya kepada kepala sekolah, nilai makanan satu porsi sebesar Rp15 ribu, sudah ada nasi, lauk, buah, sayur, dan ada susunya,

sudah lengkap. Standar gizi sudah terpenuhi," ungkap Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Ia juga mencatat pentingnya mempertimbangkan selera anak-anak agar makanan yang disediakan tidak terbuang. Hasil tinjauan ini, nantinya Komisi IX bersama instansi terkait akan melakukan evaluasi. "Nanti kita akan evaluasi secara menyeluruh, akan ada pertemuan secara khusus FGD Komisi IX dan Badan Gizi Nasional soal temuan di lapangan, termasuk misalnya jam untuk pemberian makan yang tepat jam berapa. Jangan sampai mengganggu jam pelajaran," jelasnya.

rmm/rdn

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Selamatkan Tenaga Kerja Sritex, Jangan Sampai Ada PHK



Ketua DPR RI Puan Maharani.

FOTO: EOT/AHA

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah fokus membantu karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex agar jangan sampai terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) buntut pailitnya raksasa tekstil itu. Ia menyebut, penyelesaian sekitar 50 ribu karyawan Sritex harus menjadi prioritas.

“Kita harus fokus terhadap perlindungan tenaga kerja dalam menghadapi situasi ketidakpastian seperti ini. Jangan sampai ada PHK,” ujar Puan, Kamis (31/10). Seperti diketahui, Sritex diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat Rayon (IBR).

Dalam kasus ini, Sritex dianggap lalai terhadap utang kepada IBR

sehingga persoalan berujung panjang dan berdampak fatal bagi perusahaan. Puan berharap Sritex memenuhi komitmennya untuk tidak melakukan PHK kepada para karyawannya. “Badai PHK atau PHK besar-besaran harus dihindari. Ini menyangkut nasib dan kesejahteraan para karyawan Sritex yang cukup besar,” katanya.

Pihak Sritex menyatakan memiliki sekitar 50.000 karyawan dalam grupnya di mana sebanyak 14.112 karyawan disebut terdampak langsung akibat putusan pailit tersebut. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga mengkhawatirkan akan terjadinya PHK massal karena Sritex pailit.

we/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Ibnukhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindy, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)

Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P. Ridwan Budiman, S.I.P. Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md.

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.S

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askarnal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom,

Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos.

Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nachren Ivan, S.I.Kom,

Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom,

Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi

Setianto, Taufan Syahrullil, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani,

Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie,

Balggy Maeshyntha, Anju Alfonce Sitompul, Zulfikar Mubien,

Yasmin Nabila

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,

R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie,

Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah,

Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

Indah Ekawati, S.I.Kom.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Terima Kunjungan Bamus Majelis Nasional Korsel

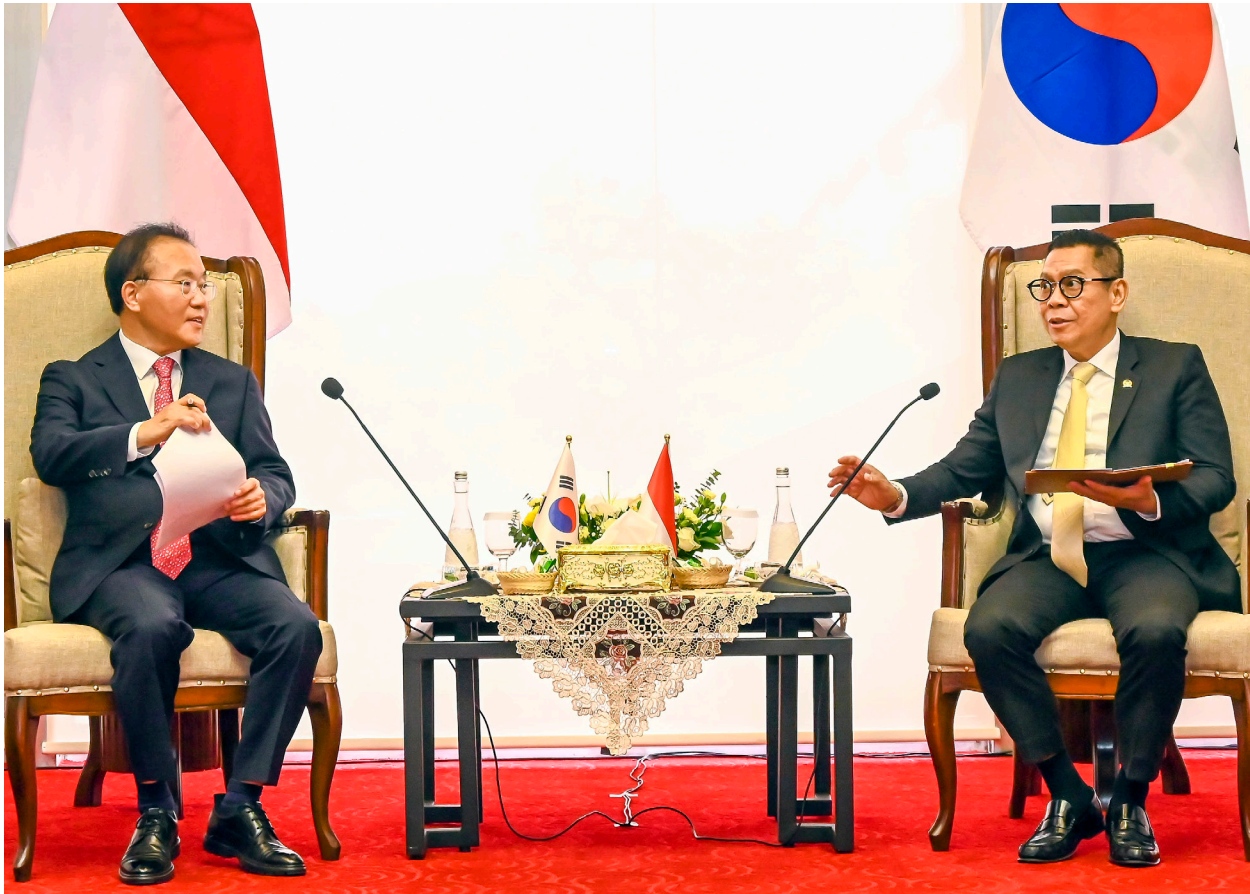


FOTO: NAR/AHA

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku), Adies Kadir, menerima kunjungan Bamus Majelis Nasional Korsel di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku), Adies Kadir, menerima kunjungan Ketua Badan Musyawarah Majelis Nasional Republik Korea Selatan (Korsel) dalam upaya menjaga peningkatan hubungan bilateral kedua negara.

"Pertemuan kami membahas hubungan kerja sama antara Indonesia dan Korsel di bidang ekonomi,

industri, umkm, olahraga dan budaya," ungkap Adies Kadir, usai menerima kunjungan Bamus Majelis Nasional Korsel di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/11).

IamengatakankerjasamaIndonesia dan Korsel sudah berlangsung selama 50 tahun lebih yang berdampak baik bagi kedua negara. "Pemain voli Indonesia Megawati juga bermain untuk tim Korsel dan cukup dicintai oleh masyarakat disana", sebutnya.

Politisi Partai Golkar ini menilai,

Korsel memiliki banyak tokoh publik yang memiliki kapasitas keilmuan maupun politik yang mumpuni, sehingga diharapkan dapat meningkatkan hubungan kedua negara. "Pelatih bola kita Shin-Tae Yong dari Korsel dan cukup dicintai juga oleh masyarakat Indonesia," tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, Adies Kadir didampingi oleh Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga dan Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun. **tn/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Omnibus Law Kesehatan, Solusi Naikkan Kualitas RS Daerah



FOTO: DEP/ATA

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Daerah (RSD) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (1/11/2024).

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Daerah (RSD) Banjarbaru, Kalimantan Selatan, untuk melihat langsung fasilitas dan kualitas pelayanan yang disediakan. Meskipun sudah memiliki fasilitas setara dengan rumah sakit tipe B, rumah sakit ini masih berstatus tipe C. Kunjungan ini juga menjadi kesempatan bagi Cucun untuk mengomunikasikan relevansi kebijakan *Omnibus Law* Kesehatan bagi pengembangan rumah sakit di daerah.

Dalam kesempatan tersebut,

Cucun menyampaikan apresiasinya terhadap RSD Banjarbaru yang dianggapnya memiliki potensi untuk meningkatkan status menjadi rumah sakit tipe B. "Rumah sakit ini sudah bagus, standar layanannya pun sudah mendekati rumah sakit tipe B," ujarnya di sela-sela kunjungan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (1/11). Namun, ia juga menyoroti adanya kekhawatiran dari pihak rumah sakit terkait perubahan status, yang berpotensi mengurangi jumlah pasien serta menambah beban kerja tenaga medis.

Menurut Cucun, Undang-Undang Omnibus Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dapat menjadi solusi

bagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi rumah sakit daerah, termasuk isu pemerataan tenaga medis. "Salah satu fokus dari UU ini adalah pemerataan fasilitas kesehatan dan tenaga medis agar kualitas layanan meningkat di daerah-daerah, termasuk peningkatan akses pendidikan spesialis bagi tenaga medis yang ingin mengabdikan di wilayah," jelasnya.

Ia juga menambahkan, *Omnibus Law* Kesehatan membuka peluang bagi rumah sakit daerah untuk menyediakan pendidikan spesialisasi. Langkah ini diharapkan dapat menarik tenaga medis ke daerah dan meningkatkan pelayanannya. **aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Ingatkan Aparat: Jaga Netralitas pada Pilkada 2024



FOTO: EKI/ANHA

Anggota Komisi I DPR RI Syamsul Rizal saat mengikuti pertemuan dengan dengan Badan Intelijen Daerah (Binda) Yogyakarta pada Jumat siang (1/11/2024).

Anggota Komisi I DPR RI Syamsul Rizal menegaskan pentingnya koordinasi intensif antaraparat dalam mengantisipasi potensi disintegrasi yang mungkin muncul selama pelaksanaan Pilkada 2024. Hal ini diungkapkan Rizal usai pertemuan antara Komisi I DPR RI dengan Badan Intelijen Daerah (Binda) Yogyakarta pada Jumat siang (1/11).

Syamsul Rizal menjelaskan bahwa Komisi I tengah berupaya memetakan berbagai potensi kerawanan di seluruh provinsi di Indonesia menjelang pesta demokrasi daerah yang semakin

dekat. Karena itu, pihaknya sudah meminta untuk mengoordinasikan kembali dan mengakumulasikan seluruh potensi kerawanan yang ada di Indonesia.

“Pemetaan ini akan menggabungkan perspektif intelijen dan pendekatan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sehingga kebijakan yang relevan bisa dirumuskan untuk deteksi dini serta langkah antisipasi,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.

Dalam kesempatan tersebut, Rizal juga menyampaikan peringatan tegas kepada semua penyelenggara negara, termasuk aparat TNI, intelijen, dan Aparatur Sipil Negara (ASN), agar

menjaga netralitas mereka selama Pilkada berlangsung. Menurutnya, semua penyelenggara negara harus bertindak sebagai fasilitator yang netral dan tidak boleh memperlihatkan keberpihakan terhadap salah satu kontestan.

“Jangan sekali-sekali ada yang berani memperlihatkan dukungan atau langkah yang menguntungkan salah satu pihak. Sebagai penyelenggara negara, netralitas itu keharusan,” tegas Rizal. Meskipun begitu, ia tetap mendorong para aparat untuk memberikan edukasi politik yang positif kepada masyarakat dalam menjaga stabilitas politik. — eki/rdn



Scan QR untuk berita selengkapnya

Rencana Rampungkan Banyak RUU Kabupaten/Kota



FOTO: JKA/AHA

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda foto bersama usai rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, (31/10/2024).

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR RI akan menyelesaikan 122 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota yang sudah dimulai pada periode sebelumnya.

“Sesuai dengan tugas fungsi Komisi II DPR di bidang legislasi, pengawasan dan penganggaran, ada beberapa hal yang menjadi fokus pada periode 2024-2029 ini. Pada bidang legislasi, Komisi II

akan menyelesaikan penggodokan RUU Kabupaten/Kota yang belum rampung. Kami *Inshaallah* akan menuntaskan 122 RUU dari 254 RUU Kabupaten/Kota, yang sebelumnya telah dikerjakan di bawah kepemimpinan kakanda kami, Ahmad Doli Kurnia Tandjung,” kata Rifqinizamy dalam rapat kerja Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, (31/10).

Menurutnya, RUU Kabupaten/Kota ini sangat penting untuk disesuaikan. Pasalnya, selama ini RUU Kabupaten/

Kota masih menggunakan Undang-Undang Dasar yang lama, yakni konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) dan UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) 1950, bukan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Dalam kesempatan itu juga sempat terungkap rencana membuat Komisi II DPR RI membuat omnibus law paket politik. Setidaknya ada tiga paket UU politik yang dipertimbangkan, yakni Undang-Undang Pemilu, UU Partai Politik dan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. **ayu/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Tangani Cepat Persoalan Reformasi Birokrasi ASN



FOTO: JKA/PDT

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, saat memimpin rapat kerja Komisi II DPR dengan KemenPAN-RB, BKN, LAN, ANRI dan Ombudsman di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan salah satu hal yang butuh penanganan yang cepat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) adalah terkait penataan Aparatur Sipil Negara (ASN). Khususnya yang berada di beberapa kementerian yang mengalami pemisahan alias kementerian baru.

“Bagi kami di Komisi II yang bertugas konstitusional sebagai pengawas, penganggaran dan legislasi, kami berkomitmen pada periode ini untuk bisa menghadirkan solusi

terbaik. Misalnya, KemenPAN-RB yang merupakan kementerian yang paling tunggu-tunggu oleh seluruh menteri dan kepala lembaga/badan yang baru saja dilantik,” ujar Rifqi, begitu ia biasa disapa, saat rapat kerja Komisi II DPR dengan KemenPAN-RB, BKN, LAN, ANRI dan Ombudsman di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10).

Pasalnya, pemisahan menjadi kementerian baru tersebut membawa konsekuensi perubahan nomenklatur berupa penambahan struktur birokrasi dan pegawai. Sehingga, ia menilai perlu solusi terbaik dan cepat bagi permasalahan tersebut. Di mana hal tersebut bisa menjadi salah

satu target dalam Program 100 Hari KemenPAN-RB yang harus dikejar atau dilaksanakan.

“Kami, Komisi II siap kapan pun dibutuhkan sesuai kewenangan kami kita menghadirkan kebijakan yang cepat, tentu sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ada rancangan undang-undang yang harus dihadirkan dalam rangka mengisi kebutuhan tersebut kami membuka ruang untuk kemudian kita segera membahasnya. Kami berharap untuk Menteri dan Wamen dan untuk bisa menyesuaikan cari kerja yang cepat ini,” papar Politisi Fraksi Partai NasDem ini. **ayu/aha**



'Ordal' Peredaran Narkoba Harus Ditindak Tegas



FOTO: YSM/PDT

Anggota Komisi III DPR RI, Andi Muzakkir Aqil saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (31/10/2024).

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Sulawesi Selatan, Anggota Komisi III DPR RI, Andi Muzakkir Aqil menyoroti perlunya upaya peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Dalam pernyataannya, Andi menekankan situasi narkoba di daerah tersebut yang semakin mengkhawatirkan.

"Dari data yang ada, meskipun baru-baru ini ada penangkapan sekitar 30 Kilogram narkoba oleh kepolisian, ini hanya menjadi pintu masuk untuk melihat lebih dalam

bagaimana jaringan peredaran narkoba beroperasi," ungkapnya usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (31/10).

Ia merasa penting menelusuri jejak pengirim dan penerima narkoba agar penangkapan tidak hanya berhenti pada tindakan penegakan hukum yang tampak, tetapi juga membongkar jaringan yang lebih besar.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak yang dirasakan oleh para pengguna narkoba. "Kita harus mengerucutkan masalah

ini dan bersama-sama melawan peredaran narkoba di Sulawesi Selatan. Masyarakat juga melaporkan bahwa situasi ini semakin mengkhawatirkan," tambahnya.

Legislator tersebut juga menyoroti jaringan narkoba seringkali melibatkan "orang dalam" yang memberikan perlindungan dan bantuan kepada para pengedar. "Tidak mungkin peredaran ini hanya dilakukan oleh pengedar saja. Ada istilahnya ordal, yaitu orang dalam yang berperan memberikan perlindungan sehingga jaringan ini dapat semakin berkembang," ujarnya.

— ysm/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya

Panja SDA Petakan Masalah Pengelolaan SDA



FOTO: MH/PDT

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath (kanan) di sela-sela pertemuan kunjungan kerja ke Palembang, Kamis (31/10/2024)

Komisi III DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Sumber Daya Alam (SDA). Isu kebocoran pengelolaan SDA di Tanah Air selalu jadi topik bahasan utama saat melakukan kunjungan kerja ke daerah. Masalah di balik pengelolaan SDA diharapkan bisa terpetakan dengan baik.

Di Palembang, Sumatera Selatan, delegasi Komisi III DPR RI telah menggelar rapat dengan Polda dan Kajati Sumsel untuk melihat dari dekat kebocoran-kebocoran yang telah merugikan negara dari sektor pengelolaan SDA. Wakil Ketua

Komisi III DPR RI Rano Alfath saat ditemui **Parlementaria** di sela-sela pertemuan, berkomentar, penegakan hukum di Sumsel sangat baik dengan menindak tegas perusahaan-perusahaan yang menambang di tambang-tambang ilegal.

“Kita ingin menutup kebocoran-kebocoran pendapatan negara dari sumber daya alam. Paparan Kapolda dan Kajati banyak sekali SDA di sini. Untuk menutup kebocoran-kebocoran SDA oleh perusahaan-perusahaan yang menambang di tambang-tambang ilegal, langsung ditindak tegas tanpa pandang bulu,” ungkap Rano saat kunjungan ke Palembang, Kamis (31/10).

Politisi PKB ini menilai, apa yang sudah dilakukan Kapolda dan Kajati di Sumsel dalam menyelamatkan pendapatan negara dari SDA sangat baik. Aset negara terselamatkan dengan penegakan hukum yang tegas dan berintegritas. “Penegakan hukum yang dilakukan Kapolda dan Kajati sudah bagus untuk menyelamatkan SDA, menyelamatkan aset dan kerugian negara,” ujarnya.

Ke depan, sambung Rano, Panja akan mencermati apa sesungguhnya masalah yang membelit SDA Indonesia di berbagai daerah, hingga banyak ditemukan kebocoran serius yang merugikan negara. **mh/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Perlu *Roadmap* untuk Penuhi Asta Cita



FOTO: A.R./PDT

Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana saat mengikuti Rapat Kerja Komisi V dengan seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI.

Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana meminta mitra Komisi V DPR RI untuk menyiapkan masukan maupun peta jalan (*roadmap*) dalam upaya pemenuhan Asta Cita yang digadang oleh Presiden Prabowo. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V dengan seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI pada Selasa (29/10) di Senayan, Jakarta

“Pada saat Raker besok, kami ingin dapat insight atau mungkin dari Kementerian mengenai *roadmap* pemenuhan apa saja yang ada di Asta Cita kemudian yang ada di 17 prioritas

dan 8 program-program *quick win* itu ditampilkan,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Danang yang merupakan anggota Badan Anggaran DPR RI itu menyampaikan bahwa baik masukan maupun *roadmap* tersebut nantinya akan digunakan oleh anggota dewan untuk memantau proses realisasi delapan misi pemerintah melalui instansi yang menjadi mitra Komisi V DPR RI

“Sehingga kita bisa ikut memantau dari kementerian-kementerian ini seperti apa prosesnya ke depan termasuk nanti anggarannya” ucapnya.

Asta Cita merupakan delapan poin misi yang merupakan perwujudan

dari Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang digadang oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Presiden Prabowo Subianto juga mencanangkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau yang disebut *quick win*. Realisasi program *quick win* ini telah disetujui DPR melalui Undang-Undang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.

Komisi V DPR RI sendiri merupakan alat kelengkapan dewan dengan ruang lingkup Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika serta Pencarian dan Pertolongan.

uc/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya

Lemahnya Kemendes-PDT Awasi Dana Desa



FOTO: AFR/PDT

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus foto bersama usai Rapat Kerja perdana Komisi V DPR RI dengan seluruh mitra di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengapresiasi paparan singkat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang menyinggung soal Dana Desa. Dalam Rapat Kerja perdana Komisi V DPR RI dengan seluruh mitra, Lasarus menyampaikan bahwa Dana Desa seolah menjadi bahan diskusi yang tak pernah terselesaikan.

“Selama bertahun-tahun kami di Komisi V ini, boleh kami bilang (soalan Dana Desa) tidak selesai kita diskusikan. Ada Rp71 triliun, kemudian apakah seluruh desa yang menerima Dana Desa ini pernah dilakukan survei terjadi

peningkatan pembangunan apa tidak? Kemudian penggunaan dana optimal apa tidak?” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut saat memimpin rapat di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10).

Menurutnya, salah satu tugas berat dari Kementerian Desa dan PDT adalah persoalan pengawasan penggunaan dana desa. Hal ini disampainya lantaran institusi tersebut tidak memiliki organisasi di daerah sehingga pengawasan penggunaan Dana Desa diserahkan kepada inspektorat di masing-masing kabupaten.

“Pengawasan Dana Desa ini diserahkan kepada kabupaten, inspektorat

kabupaten (dan) akhirnya kepala desa lebih takut kepada inspektorat daripada kepada Menteri Desa yang memegang anggaran Rp71 triliun,” ujar Lasarus sambil berkelakar.

Lasarus menyatakan dukungannya agar nantinya Kementerian Desa dan PDT melakukan perumusan sistem pengawasan penggunaan Dana Desa. Ia pun menyinggung banyaknya Kepala Desa yang harus berhadapan dengan proses hukum lantaran tidak mengerti penggunaan dana tersebut serta banyaknya desa yang menerima Dana Desa namun tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan.

uc/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya



KPPU Diminta Ciptakan Iklim Usaha Bebas Monopoli



FOTO: ENO/PDT

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua KPPU di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Program kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU (tahun 2025) diharapkan dapat mendorong penciptaan iklim berusaha menjadi lebih sehat dan kondusif melalui pemberian jaminan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha. Serta dapat mencegah praktik usaha yang tidak sehat seperti monopoli dan kartel.

Melalui penciptaan iklim berusaha yang sehat diharapkan dapat menciptakan struktur ekonomi efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi

yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu diingatkan oleh Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua KPPU.

"Ujung-ujungnya adalah semua yang kita lakukan apakah itu kerja yang ada di legislatif maupun pemerintah ujung-ujungnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi itulah adalah *goal* utama," ujar Anggia dalam rapat dengar pendapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (31/10) yang juga dihadiri Ketua Badan Perlindungan

Konsumen Nasional (BKPN) itu.

Mengingat, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) seperti diketahui merupakan penjabaran rencana anggaran jangka menengah yang disusun di setiap tahunnya. Hal ini, tandas Anggia, penting dilakukan agar sasaran program pembangunan Pemerintah dapat diterjemahkan dan diimplementasikan oleh Kementerian, Badan, Lembaga Negara dengan baik melalui program kerja yang didukung rencana anggaran yang dibutuhkan.

pun/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya

Supaya Mitigasi Bencana Efektif dan Berkelanjutan



FOTO: MUN/PDT

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang usai rapat kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, di Nusantara II, Senayan, Jakarta. Selasa (29/10/2024).

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, memimpin rapat kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, di Nusantara II, Senayan, Jakarta, untuk membahas rencana program kerja dan anggaran BNPB tahun 2025 serta isu-isu kebencanaan yang krusial.

Dalam rapat kerja pada Selasa itu (29/10), Komisi VIII menyetujui anggaran BNPB untuk tahun 2025 sebesar Rp1,43 triliun. Anggaran ini mencakup Program Dukungan Manajemen sebesar Rp306,4 miliar dan Program Ketahanan Bencana

sebesar Rp1,12 triliun. Selain itu, Komisi VIII juga mencatat realisasi anggaran BNPB tahun 2024 telah mencapai 80,71 persen dari total anggaran Rp3,34 triliun.

Marwan Dasopang menekankan pentingnya peningkatan kinerja BNPB dalam merespons isu kebencanaan yang semakin kompleks. Ia mendesak agar BNPB memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama untuk mitigasi di daerah rawan bencana. "BNPB perlu lebih proaktif dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga terkait guna memastikan upaya mitigasi bencana berjalan efektif dan

berkelanjutan," ujar Marwan.

Selain itu, Marwan juga mengusulkan perlunya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, guna menyesuaikan regulasi dengan tantangan kebencanaan terkini. Komisi VIII meminta BNPB meningkatkan anggaran untuk mitigasi dan bantuan bencana, termasuk dukungan bantuan internasional.

Komisi VIII dan BNPB akan melakukan pendalaman lebih lanjut terkait program serta kelembagaan BNPB demi memperkuat kesiapan Indonesia dalam menghadapi bencana.

— **ssb/aha**



Tuntut Pengawasan Haji Lebih Ketat dan Transparan



FOTO: MUN/PDT

Anggota Komisi VIII DPR, Achmad dalam rapat kerja perdana Komisi VIII DPR RI bersama kabinet baru yang dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi terkait di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin, (28/10/2024).

Kompleks Parlemen Senayan kembali menjadi saksi pembahasan penting terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 Masehi. Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR RI, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, serta beberapa perwakilan lainnya, di antaranya Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, mengupas evaluasi dan laporan keuangan penyelenggaraan haji serta isu-isu aktual yang menyertainya.

Salah satu sorotan utama dalam rapat adalah usulan peningkatan

pengawasan eksternal. Anggota Komisi VIII DPR, Achmad, menegaskan perlunya pengawasan lebih dari sekadar internal Kementerian Agama. Ia mengusulkan agar lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung turut terlibat, guna menjamin tidak adanya penyelewengan keuangan dalam penyelenggaraan haji.

"Pengawasan tidak hanya cukup internal dari Irjen Kemenag. KPK dan Kejaksaan sebaiknya ikut serta mengawasi agar lebih transparan dan mencegah penyimpangan," ujar Achmad apat kerja perdana Komisi VIII DPR RI bersama kabinet baru yang dihadiri oleh sejumlah pejabat

tinggi terkait di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin, (28/10). Dia juga menekankan pentingnya sistem terbuka, di mana masyarakat bisa mengakses informasi haji untuk meningkatkan transparansi.

Masalah kualitas petugas haji turut menjadi fokus pembahasan. Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya Kamil, menyarankan agar petugas haji wajib memiliki pengalaman dalam pelaksanaan ibadah haji atau setidaknya umrah. Menurutnya, pengalaman tersebut krusial agar petugas dapat fokus melayani jemaah, terutama dalam kondisi lapangan yang sering kali tak terduga.

➡ **ssb/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Tak Pandang Manusia Sebatas Angka Saja



FOTO: AZK/PDT

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani di sela-sela agenda Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyatakan optimismenya terhadap program kerja ‘*triple skilling*’ yang dinilai bisa diimplementasikan dengan tepat guna dan tepat sasaran di bawah Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Sebab, program kerja ini telah disusun dengan basis pemetaan masalah yang matang sekaligus kebutuhan kompetensi yang diperlukan untuk masyarakat Indonesia.

Hal ini disampaikannya di sela-sela agenda Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10). Ia

pun berharap Kementerian Ketenagakerjaan di kabinet kali ini dapat memanusiakan SDM melalui kebijakan yang dilahirkan, tidak dipandang sebagai sekadar angka saja.

“Beliau (Menteri) sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan, program (*triple killing*) ini berpotensi bisa diterapkan sesuai dengan *target*. Saya juga mengapresiasi bahwa Pak Menteri juga memahami pemberdayaan SDM harus optimal dan manusiawi. Ini harus kita apresiasi, ini jadi langkah awal beliau untuk masuk kementerian yang disodori banyak PR (pekerjaan rumah),” tutur Netty.

Sebagai informasi, ‘*triple skilling*’ adalah program pelatihan yang terdiri dari tiga komponen, yaitu *skilling*,

upskilling, dan *reskilling*. Program yang memetakan tiga jenis target SDM berdasarkan kebutuhan kerja ini telah diterapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap kerja sejak tahun 2019.

“Supaya program ini bisa terselesaikan, Kemnaker juga harus menjalankan fungsi koordinasi supaya kebutuhan, kemampuan, dan lapangan kerja benar-benar bisa selaras. Perlu kita ketahui, *baseline* ketenagakerjaan adalah pendidikan. Kalau pendidikan tak diperbaiki, ya sama saja. Kasihan, menterinya nanti,” pungkas Politisi Fraksi PKS ini.

um/rdn



Scan QR untuk berita selengkapnya

Apresiasi Pelayanan Kesehatan di RSUD Kota Depok



FOTO: TRM/PDT

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani bersama tim Kunsfik Komisi IX DPR RI usai meninjau pelayanan kesehatan di RSUD KiSA Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (1/11/2024).

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Depok khususnya dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Khidmat Sehat Afiat (KiSA) Kota Depok. Mengingat karakteristik Kota Depok yang sangat padat hunian di samping masyarakatnya yang juga terdidik, Netty menilai, perlu ada keseimbangan dengan pelayanan kesehatan yang prima.

“RSUD KiSA juga sudah mulai melengkapi sarana dan prasarana

untuk penanganan penyakit degeneratif yang hari ini banyak melanda masyarakat. Hal ini ditandai dengan sejumlah ruangan sudah menggunakan alat pemeriksaan yang *support* terhadap penegakkan diagnosis penyakit kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi (KJSU),” jelas Netty kepada **Parlementaria** usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke RSUD KiSA Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (1/11).

Lebih lanjut, politisi dapil Jawa Barat VIII itu turut mendorong sejumlah bantuan-bantuan terkait alat kesehatan yang dibutuhkan RSUD

KiSA untuk lebih ditingkatkan. “Adasatu alat lagi yang diperlukan yaitu Magnetic Resinace Imaging (MRI), kemudian tadi kita juga meninjau Cath Lab yang insyaallah akhir November ini selesai,” pungkas Politisi Fraksi PKS ini.

Di samping fasilitas pelayanan kesehatan Netty menambahkan, RSUD KiSA juga siap menerapkan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) pengganti kelas 1, 2, dan 3 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebagai informasi, RSUD KiSA Kota Depok telah menyiapkan belasan ruangan KRIS, di mana setiap kamar berisi empat tempat tidur. **tra/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Komisi X Harap Keberagaman Indonesia Semakin Dikenal Dunia



FOTO: FHN/PDT

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Mahfudz Abdurrahman.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Mahfudz Abdurrahman mengatakan kebijakan Presiden Prabowo yang membentuk Kementerian baru, Kementerian Kebudayaan, pada Kabinet Merah Putih merupakan hal yang sangat tepat. Menurut Mahfudz, diharapkan setiap Kementerian semakin fokus dan lebih cepat mewujudkan target yang sudah ditetapkan oleh Kepala Negara Republik Indonesia.

“Saya sangat bergembira ada Kementerian Kebudayaan sekarang,

karena budaya lah yang membuat Indonesia sangat kaya dan dikenal di seluruh dunia,” ucap Mahfudz Abdurrahman dalam keterangan pers kepada **Parlementaria**, di Jakarta, Rabu (30/10).

Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat VI melanjutkan pihaknya mengaku siap membahas program Kebudayaan. “Kami di Komisi X sangat siap membahas program-program dari Kementerian Kebudayaan, yang Menterinya merupakan sahabat dekat saya, saudara Dr. Fadli Zon. Saya yakin Pak Menteri Kebudayaan akan mampu menjawab harapan dan keinginan masyarakat. Yang jelas spektrum

Kebudayaan sangat luas. Indonesia terdapat beragam Suku, Ras, Seni, Budaya, dan Bahasa. Belum lagi cagar budaya, warisan budaya tidak benda. Yang semua hal tersebut memerlukan perhatian serius dari Pemerintah,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Mahfudz berharap agar program-program yang akan dilaksanakan, mampu dirasakan manfaatnya oleh pelaku kebudayaan. “Dengan kata lain perlu dilakukan *urun rembug* atau meminta saran dan masukan dari *stakeholder* kebudayaan. Walau kita memahami bahwa urusan kebudayaan ini sangat luas dan banyak variabelnya,” terang Mahfudz. **tn/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya

Dorong Pendidikan Gratis Secara Menyeluruh



FOTO: FHN/PDT

Anggota Komisi X DPR RI Nita Jacoba Gah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dikdasmen di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Program sekolah swasta gratis diharapkan mampu segera terealisasi pada tahun 2025 mendatang.

Dengan demikian tidak ada lagi diskriminasi di bidang pendidikan Indonesia. Pemerintah dinilai perlu membuat regulasi yang kuat sebagai alas hukum untuk mewujudkan kebijakan tersebut.

"Kami dukung usulan pendidikan gratis secara menyeluruh bagi sekolah negeri maupun swasta sehingga tidak ada lagi diskriminasi dalam dunia pendidikan," ungkap Anggota Komisi X DPR RI Nita Jacoba Gah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dikdasmen di Gedung

Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10).

Ia menilai pendidikan gratis saat ini masih didominasi oleh sekolah negeri. Padahal, menurutnya sudah menjadi tugas pemerintah untuk memastikan tidak adanya anak yang terhambat pendidikan karena biaya untuk mewujudkan generasi Indonesia emas pada tahun 2045.

"Anggaran pendidikan kita hanya Rp665 triliun hingga Rp700 triliun pada tahun 2024. Pemerintah beralasan anggaran yang ada tidak akan cukup jika dipaksakan untuk program sekolah gratis bagi swasta. Kami mendorong agar anggaran pendidikan yang ada dapat ditambahkan sehingga program sekolah gratis secara menyeluruh dapat

teralisasi," pungkas Politisi Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut, Nita menyoroti anggaran pendidikan yang terbagi-bagi dalam setiap Kementerian. Menurutnya anggaran pendidikan seharusnya dikelola oleh satu Kementerian saja.

"Anggaran pendidikan kita terbagi-bagi ya seharusnya kan satu Kementerian saja yang kelola sehingga lebih maksimal. Seharusnya pemerintah patuh pada amanat undang-undang pasal 31 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan artinya secara menyeluruh tidak memandang negeri atau swasta," tuturnya.

— tn/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya

RUU KUHAP Berpotensi Masuk Dalam Prolegnas



FOTO: AZK/PDT

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Martin Manurung saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum dengan sejumlah organisasi pada Rabu (31/10/2024) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.

Dalam upaya menjarung aspirasi masyarakat terkait penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan sejumlah organisasi pada Rabu (31/10) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.

Dalam rapat yang dihadiri oleh LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) tersebut, terdapat beberapa usulan yang kemudian menarik perhatian pimpinan dan Anggota Baleg DPR

RI, salah satunya adalah terkait dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Soal KUHAP, saya pikir, saya dan juga Fraksi Partai NasDem setuju untuk KUHAP ini kita jadikan prioritas pada prolegnas 2025. Karena, memang KUHP-nya sendiri akan berlaku pada Januari 2026 dan banyak ketentuan pidana dan alternatif pidana yang baru yang perlu diatur dalam KUHAP tersebut Bagaimana pelaksanaannya,” tutur Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Martin Manurung saat memimpin jalannya rapat.

Pada kesempatan tersebut, usulan revisi KUHAP disampaikan oleh perwakilan dari LBH APIK dan ICJR. Sebelumnya dipaparkan oleh ICJR

bahwa dibutuhkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur teknis formil dan peranan APH untuk mengaur ketentuan baru di dalam KUHP baru.

Sedangkan usulan dari LBH APIK terkait revisi KUHAP antara lain mengenai hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana, ketentuan mengenai perlindungan korban, ketentuan mengenai alat bukti, peraturan mengenai praperadilan, restitusi dan kompensasi, ketentuan mengenai penerimaan laporan di Kepolisian dan penerapan keadilan restoratif yang tidak tepat dalam penegakan hukum. Selain itu, KUHAP juga dianggap belum update untuk perkara menggunakan sarana elektronik. **uc/aha**



Galang Dukungan RUU PPRT Masuk Prolegnas RUU



FOTO: AZK/PDT

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hindun Anisah saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Baleg DPR RI dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Indonesian Parliamentary Center (IPC), dan Komnas Perempuan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hindun Anisah mengapresiasi Komnas Perempuan yang konsisten memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Sebab itu, ia berkomitmen konsisten mendukung

RUU ini masuk ke dalam daftar Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 hingga disahkan menjadi Undang-Undang.

Pernyataan ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Baleg DPR RI dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK),

Indonesian Parliamentary Center (IPC), dan Komnas Perempuan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024). Perlu diketahui, mayoritas PRT yang dikirim ke luar negeri adalah kalangan perempuan.

“Untuk Komnas Perempuan, saya sangat mengapresiasi soal usulan RUU PPRT yang mendesak untuk disahkan karena kita tahu, kita sendiri, sebagai negara yang mohon maaf, negara pengirim *domestic worker* ke negara di negara-negara penempatan di hampir di 12 negara dan sampai saat ini jumlah *domestic worker* kita yang ada di luar negeri itu di tahun 2024, dari Januari sampai Agustus ada 108.477 orang. Ini *domestic worker* kita yang mayoritas perempuan,” terang Hindun.

Dalam agenda tersebut, Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu menggalang dukungan dihadapan pimpinan Baleg DPR RI sekaligus para anggota dewan yang hadir untuk mengawal RUU PPRT bisa masuk sebagai bagian dari Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 hingga disahkan menjadi Undang-Undang.

um/aha

UNTUK KOMNAS PEREMPUAN, SAYA SANGAT MENGAPRESIASI SOAL USULAN RUU PPRT YANG MENDESAK UNTUK DISAHKAN KARENA KITA TAHU, KITA SENDIRI, SEBAGAI NEGARA YANG MOHON MAAF, NEGARA PENGIRIM DOMESTIC WORKER KE NEGARA DI NEGARA-NEGARA PENEMPATAN DI HAMPPIR DI 12 NEGARA DAN SAMPAI SAAT INI JUMLAH DOMESTIC WORKER KITA YANG ADA DI LUAR NEGERI ITU DI TAHUN 2024, DARI JANUARI SAMPAI AGUSTUS ADA 108.477 ORANG. INI DOMESTIC WORKER KITA YANG MAYORITAS PEREMPUAN,

Hindun Anisah

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Tinjau Layanan Modern & Tradisional di RSUD Cibinong



FOTO: SKR/PDT

Wakil Ketua BURT DPR RI, Indah Kurnia, saat memimpin kunjungan kerja BURT DPR RI di RSUD Cibinong, Jawa Barat, Jumat (01/11/2024).

Dalam kunjungannya ke RSUD Cibinong, Jawa Barat, Wakil Ketua BURT DPR RI, Indah Kurnia, menyatakan kepuasannya terhadap inovasi yang dihadirkan rumah sakit tersebut. RSUD Cibinong kini tidak hanya mengandalkan perawatan medis konvensional, tetapi juga pengobatan tradisional yang mengikuti tren kebutuhan masyarakat.

Indah Kurnia menyebut, rumah sakit yang dipimpin oleh Yukie Meistisia A. Satoto ini memiliki layanan *telemedicine*, *home care*, dan Program

CAGEUR (Cangcang Ngubaran Dulur) untuk meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat.

RSUD Cibinong juga telah meraih penghargaan atas inovasi yang dikembangkan, termasuk dengan menyertakan terapi tradisional seperti akupunktur. "Saya pikir layanan yang diberikan RSUD Cibinong sangat lengkap. Ini menjadikan rumah sakit ini sebagai salah satu rujukan utama di Jawa Barat," ujar Indah kepada **Parlementaria** di RSUD Cibinong, Jawa Barat, Jumat (1/11).

"Selain medis juga ada yang tradisional seperti akupunktur dan lain

sebagainya. Pengobatan-pengobatan tersebut yang kita tahu, akhir-akhir masyarakat kita cenderung untuk *Back To Nature* jadi menggunakan tradisi-tradisi yang telah membudaya dari orang-orang tua kita itu tetap juga bisa diterima oleh rumah sakit ini," ujarnya.

Kerja sama dengan rumah sakit di Penang, Malaysia, menjadi nilai tambah yang diharapkan dapat meningkatkan mutu layanan RSUD Cibinong. Rumah sakit ini menyediakan layanan pendampingan penuh bagi pasien yang harus menjalani pengobatan di luar negeri. **skr/rdn**



Pemilihan Ketua KWP Periode 2025-2027



FOTO: PRIMA

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, dalam foto bersama usai membuka pemilihan umum Ketua KWP di Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/11/2024).

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara Anggota DPR RI, Biro Pemberitaan Parlemen, dan wartawan dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

“Forum kali ini diadakan tidak hanya untuk meningkatkan sinergi antara para wakil rakyat dan Biro Pemberitaan Parlemen dengan wartawan parlemen, tetapi juga untuk melahirkan Ketua Komunitas Wartawan Parlemen (KWP) periode 2025-2027 yang amanah, berkarakter, dan kompeten melalui proses pemilihan

yang demokratis dan adil,” ujar Rizki saat membuka pemilihan umum Ketua KWP di Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/11).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini berharap agar ketua KWP yang terpilih kelak memiliki kualitas yang baik serta mampu menjalin sinergi dengan Anggota Dewan dan Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI. Menurut Rizki, hal ini penting untuk menghimpun masukan serta langkah strategis guna optimalisasi pemberitaan positif parlemen dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik.

“Ketua KWP terpilih diharapkan mampu memperbaiki kelemahan

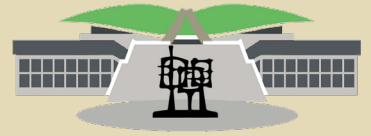
yang ada sambil melanjutkan agenda baik yang telah berjalan, serta menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas, lebih cepat, dan tetap akurat,” pungkas Legislator Dapil Banten I tersebut.

Rizki juga menegaskan bahwa KWP dan Biro Pemberitaan Parlemen memiliki tugas besar dalam menyukseskan agenda penting DPR RI. “Sudah sepatutnya kita bersinergi untuk menyampaikan kabar baik, menunjukkan ketangguhan, kekuatan, gotong royong, serta solidaritas yang menjadi modal kita menghadapi arus pemberitaan negatif di Parlemen,” tutupnya.

pdt/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya





**Komisi V DPR RI menyoroti
pengawasan ketat
terhadap maskapai
jelang libur Natal & Tahun
Baru dengan melakukan
kunjungan kerja spesifik ke
Bandara Soekarno - Hatta,
Tangerang, Banten, Kamis
(31/10/2024)
FOTO: BUNG/AHA**

